

**MODEL KEBIJAKAN PEMERIKSAAN TEMATIK
ATAS AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Disusun Oleh:

NAMA : ENI TRIANA YULIANI
NPM : 2141021037
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

**Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)**



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

**MODEL KEBIJAKAN PEMERIKSAAN TEMATIK
ATAS AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Disusun Oleh:

**NAMA : ENI TRIANA YULIANI
NPM : 2141021037
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK**



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

PROGRAM MAGISTER TERAPAN

TAHUN 2023

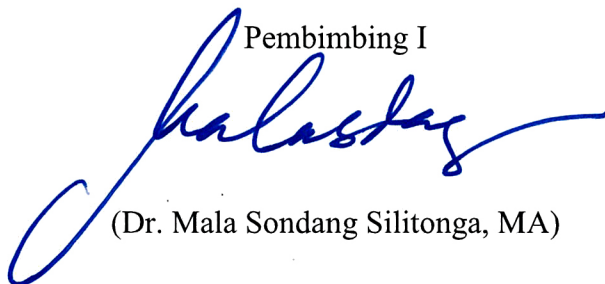
**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Eni Triana Yuliani
NPM : 2141021037
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Model Kebijakan Pemeriksaan Tematik atas Agenda
(Bahasa Indonesia) Pembangunan Nasional pada Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia
Judul Tesis : *The Thematic Audit Policy Model of the National*
(Bahasa Inggris) *Development Agenda at the Audit Board of the*
Republic of Indonesia

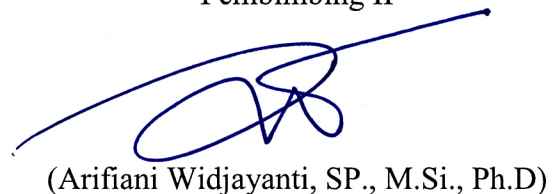
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Mala Sondang Silitonga, MA)

Pembimbing II



(Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

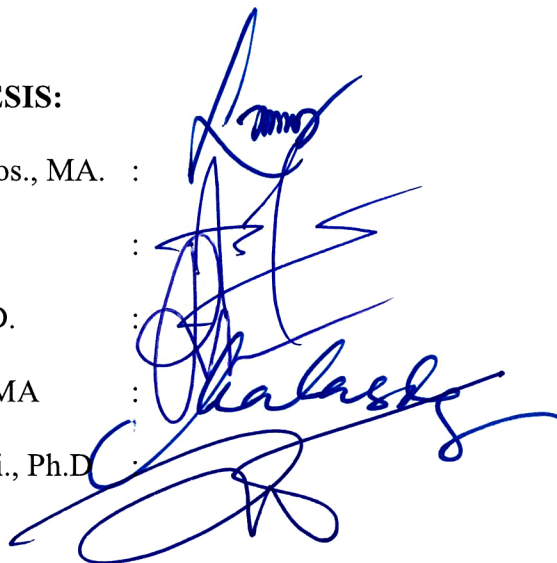
NAMA : ENI TRIANA YULIANI
NPM : 2141021037
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : MODEL KEBIJAKAN PEMERIKSAAN TEMATIK
ATAS AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi
Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada;

Hari : Jumat
Tanggal : 28 Juli 2023
Pukul : 15.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA. :
Sekretaris : Dr. Asropi, S.Ip., M.Si :
Anggota : Ratri Istantia, S.IP., MA., Ph.D. :
Pembimbing 1 : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA :
Pembimbing 2 : Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D. :



**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Triana Yuliani
NPM : 2141021037
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis yang telah saya susun dengan Judul “MODEL KEBIJAKAN PEMERIKSAAN TEMATIK ATAS AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulis tesis ini merupakan plagiat atau penjiplak terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



(Eni Triana Yuliani)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: Model Kebijakan Pemeriksaan Tematik atas Agenda Pembangunan Nasional pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP) pada Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan andil dalam proses penulisan tesis ini.

1. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA dan Ibu Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, koreksi, pencerahan, saran, dan masukan yang sangat berarti bagi penulisan tesis ini;
2. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta sekaligus ketua tim penguji sidang tesis yang telah bersedia memberi masukan dalam penyempurnaan tesis;
3. Bapak Dr. Asropi, S.Ip., M.Si., selaku dosen penguji yang telah bersedia memberikan masukan perbaikan serta semangat untuk berani melakukan diseminasi hasil penelitian ini;
4. Ibu Ratri Istania, S.IP., MA., Ph.D., selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan demi kesempurnaan tesis ini;
5. Seluruh dosen pengajar pada Magister Manajemen Kebijakan Publik Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah berkenan memberikan ilmunya kepada saya selama menempuh perkuliahan;
6. Seluruh staf Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan Politeknik STIA LAN Jakarta khususnya Mbak Mega dan Mbak Seha yang telah membantu proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan pelaksanaan sidang akhir;

7. Para Narasumber yang luar biasa Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Bapak Dr. Riant Nugroho; Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Bappenas Bapak Thohir Afandi, S.Pd, MPA; Tenaga Ahli Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Fajar Nurmansyah dan Febri Kuntarto; serta Para Pejabat Struktural dan Fungsional pada BPK RI yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan tanggapan melalui wawancara yang saya lakukan untuk keperluan tesis ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan di Magister Administrasi Publik terutama pada konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik Kelas A STIA LAN Jakarta yang selalu kompak dan memberikan dukungan, motivasi, dan kerja sama selama ini, saya yakin kalian juga pasti akan segera menyelesaikan perkuliahan ini;
9. Kedua orang tua, Bapak Sumardi dan Ibu Parsiyati, kakak-kakak, adik-adik atas do'a dan dukungan yang tiada putusya termasuk pada saat melaksanakan dan menyelesaikan perkuliahan ini sampai lulus;
10. Suamiku tercinta Habib Ramadhan yang selalu sigap memberikan bantuan, dukungan, semangat, serta doa; anak-anakku tersayang kakak Tazkia dan adek Azzam yang rela waktu bersamanya terganggu dengan waktu-waktu sekolah dan bekerja ibunya—kalian hebat!;
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan demi terselesaikannya tesis saya, semoga segala kebaikan kalian dibalas berlipat-lipat oleh Allah SWT.

Akhir kata, peneliti memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu manajemen kebijakan publik dan dapat diterapkan di dalam praktik implementasi kebijakan, serta peneliti lain yang ingin memperdalam penelitian ini.

Jakarta, 12 Agustus 2023

Eni Triana Yuliani

Model Kebijakan Pemeriksaan Tematik atas Agenda Pembangunan Nasional pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

**Eni Triana Yuliani, Mala Sondang Silitonga, Arifiani Widjayanti
Politeknik STIA LAN Jakarta**

Abstrak

Setiap periode Renstra (per lima tahun), BPK menetapkan kebijakan pemeriksaan untuk dapat dipedomani oleh seluruh unit kerja pemeriksaan di BPK. Pada periode Renstra BPK Tahun 2020 – 2024 perumusannya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 sebagai upaya BPK untuk mendorong evaluasi dan peningkatan program pembangunan pemerintah. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, masih ditemukan permasalahan terkait dengan kurang luasnya cakupan pemeriksaan tematik tentang agenda pembangunan nasional, sebagaimana yang telah dilakukan BPK pada semester II Tahun 2021 yaitu pada prioritas nasional 1 dan 3. Selain itu, BPK masih memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya baik manusia maupun anggaran. Hal ini akan menimbulkan risiko tidak tercapainya penilaian dari BPK yang lebih komprehensif atas permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yaitu wawancara terhadap kelompok kerja (pokja), auditor, koordinator pemeriksaan tematik Prioritas Nasional di BPK, Penyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK, BAKN DPR RI, Bappenas, organisasi profesi audit, serta pakar kebijakan publik. Penelitian dilakukan menggunakan 6 (enam) langkah analisis kebijakan dalam Model Dasar Analisis Kebijakan Patton dan Savicky. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa model kebijakan pemeriksaan tematik yang paling tepat diterapkan di BPK adalah model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif. Model ini menekankan pada kolaborasi antar unit kerja pemeriksaan di BPK. Setiap unit kerja pemeriksaan dengan berbagai portofolionya yang berbeda satu dengan yang lain, akan mendukung satu tema besar dengan memfokuskan pada entitas pemeriksaannya masing-masing. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan kepada lembaga audit terutama BPK dalam mempersiapkan lebih matang lagi terkait dengan kebijakan pemeriksaan tematik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sehingga mampu menghasilkan penilaian yang memadai dan berdampak bagi pemerintah.

Kata Kunci: kebijakan audit; model kebijakan audit; audit kolaboratif; pemeriksaan tematik

The Thematic Audit Policy Model of the National Development Agenda at the Audit Board of the Republic of Indonesia

**Eni Triana Yuliani, Mala Sondang Silitonga, Arifiani Widjayanti
Politeknik STIA LAN Jakarta**

Abstract

In each Strategic Plan period (every five years), BPK determines an audit policy to be guided by all audit work units at BPK. During the 2020-2024 BPK Strategic Plan period, the formulation was aligned with the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) as BPK's effort to encourage evaluation and improvement of government development programs. However, based on the results of the evaluation, problems were still found related to the lack of coverage of thematic audits on the national development agenda, as BPK had done in semester II of 2021, namely on national priorities 1 and 3. In addition, BPK is still has limitations in terms of both human and budgetary resources. This will pose a risk of not achieving a more comprehensive BPK assessment of the problems found during the audit. This study uses a qualitative approach using primary data, namely interviews with working groups (pokja), auditors, coordinators of National Priority thematic inspections at BPK, Compilers of Summary of BPK Examination Results, BAKN DPR RI, Bappenas, audit professional organizations, and public policy experts. The research was conducted using the basic model of Patton and Sawicky's policy analysis. The results of the study concluded that the thematic audit policy model that was most appropriate to be applied at BPK was the collaborative thematic audit policy model. This model emphasizes collaboration between audit work units at BPK. Each inspection work unit with its various portfolios that are different from one another, will support one big theme by focusing on their respective inspection entities. The research results are expected to be able to provide input to audit institutions, especially BPK, in preparing more thoroughly related to thematic audit policies starting from planning, implementation, and reporting so as to be able to produce adequate assessments and have an impact on the government.

Keywords: *audit policy; audit policy model; collaborative audits; thematic examination*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Rumusan Permasalahan.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	19
1. Tinjauan Kebijakan.....	19
2. Tinjauan Teoritis.....	23
a. Pengertian Kebijakan Publik.....	23
b. Proses Analisis Kebijakan.....	24
c. Evaluasi Kebijakan.....	29
d. Teori Agensi.....	31
e. Agenda Pembangunan.....	32
f. Pemeriksaan Kinerja.....	33
g. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.....	35
h. Teori Kolaborasi.....	38

i. Diskusi Antar Teori.....	39
C. Kerangka Berfikir.....	40
BAB III. METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Sumber Data.....	44
a. Data Primer.....	44
b. Data Sekunder.....	45
2. Metode Pengumpulan Data.....	45
a. Wawancara.....	45
b. Dokumentasi.....	50
C. Teknis Pengolahan dan Analisis Data.....	49
1. Pengolahan Data Hasil Wawancara.....	50
2. <i>Grid Analysis</i>	51
D. Prosedur Validasi Model.....	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	54
A. Gambaran Umum Penelitian.....	54
B. Analisis Hasil Penelitian.....	58
1. Mendefinisikan, Verifikasi, Dan Mendetailkan Permasalahan Kebijakan (<i>Verify, Define, and Detail the Problem</i>).....	58
2. Membuat Kriteria Evaluasi (<i>Establishing Evaluation Criteria</i>).....	77
3. Mengidentifikasi Alternatif Kebijakan (<i>Identify Alternative Policies</i>)....	90
4. Evaluasi Alternatif Kebijakan (<i>Evaluate Alternative Policies</i>).....	94
5. Menyajikan dan Membedakan Alternatif Kebijakan (<i>Display and Distinguish Among Alternative Policies</i>).....	95
6. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan yang Diimplementasikan (<i>Monitor the Implemented Policy</i>).....	109
BAB V. PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Usulan Proyeksi Awal Pemeriksaan Tematik BPK atas Agenda RPJMN TA 2020-2024
- Tabel 3.1 *Key Informan* dan Tujuan Wawancara
- Tabel 4.1 *Grid Analysis* Menggunakan Tujuh Kriteria Evaluasi Untuk Tiga Alternatif Kebijakan
- Tabel 4.2 Perbandingan Alternatif Model Kebijakan Pemeriksaan Tematik



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Ringkasan Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) pada Prioritas Nasional (PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi
- Gambar 1.2 Ringkasan Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) pada Prioritas Nasional (PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi serta Realisasi Pemeriksaan Strategis di BPK Tahun 2021
- Gambar 1.3 Ringkasan Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) pada Prioritas Nasional (PN) 3 Pembangunan Sumber Daya Manusia
- Gambar 1.4 Ringkasan Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) pada Prioritas Nasional (PN) 3 Pembangunan Sumber Daya Manusia serta Realisasi Pemeriksaan di BPK Tahun 2021
- Gambar 2.1 Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan
- Gambar 2.2 *A Basic Policy Analysis Process* (Patton et al., 2015)
- Gambar 2.3 Proses Kebijakan (Nugroho, 2018)
- Gambar 2.4 Evaluasi Kebijakan di Indonesia (Nugroho, 2018)
- Gambar 2.5 Hubungan masyarakat (*principal*) – pemerintah (*agent*) – auditor
- Gambar 2.6 Kerangka Berfikir Model Kebijakan Pemeriksaan Tematik Agenda Pembangunan Menggunakan Model Dasar Analisis Kebijakan Patton dan Savicky
- Gambar 3.1 Gambaran Umum Langkah Penelitian Menggunakan Model Dasar Analisis Kebijakan Patton dan Savicky
- Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPK
- Gambar 4.2 Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK Tahun 2020 – 2024
- Gambar 4.3 Kesimpulan di Dalam Undang-Undang BPK
- Gambar 4.4 Ringkasan Permasalahan terkait dengan Kebijakan Pemeriksaan Tematik di BPK pada Renstra 2020 – 2024
- Gambar 4.5 Ringkasan Kriteria Evaluasi yang Dibangun dari Permasalahan yang Muncul
- Gambar 4.6 Ringkasan Hasil Identifikasi Alternatif Kebijakan
- Gambar 4.7 Model Kebijakan Pemeriksaan Kolaboratif

- Gambar 4.8 Penerapan Kriteria Menuju Penyajian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
- Gambar 4.9 Strategi Implementasi Model Kebijakan Pemeriksaan Tematik Kolaboratif
- Gambar 4.10 Monitoring Penerapan Kebijakan Pemeriksaan Tematik Kolaboratif
- Gambar 4.11 Unit Kerja yang Terlibat dalam Proses Monitoring Kebijakan Pemeriksaan Tematik Kolaboratif



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Utama kepada *Key Informan*
- Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Magister
Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006. BPK memiliki tugas untuk mendorong pencapaian tujuan negara. Tugas tersebut dilakukan BPK melalui pelaksanaan pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Pemeriksaan BPK dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas pelaksanaan program/kegiatan strategis dalam agenda pembangunan nasional. Pengecekan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan untuk memastikan bahwa program/kegiatan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Penyelarasan tema audit dengan agenda pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN/RPJMD) 2020-2024 merupakan upaya yang dilakukan BPK untuk mendorong evaluasi dan peningkatan program pembangunan pemerintah. Penyelarasan berfokus pada kepentingan bersama (*focal point*) para *stakeholders*. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan strategis, baik berupa pemeriksaan tematik nasional/lokal maupun pemeriksaan signifikan lainnya, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. Pemeriksaan dilakukan di seluruh unit kerja untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama antar unit kerja BPK untuk memperoleh rekomendasi, pendapat, atau pertimbangan yang lebih lengkap dan menyeluruh (komprehensif).

Tabel 1.1 Usulan Proyeksi Awal Pemeriksaan Tematik BPK
atas Agenda RPJMN TA 2020-2024

No	Agenda RPJMN 2020-2024	Usulan Proyeksi Tahun Pemeriksaan	Keterangan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	2021	telah dilaksanakan
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	2023	belum dilaksanakan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	2021	telah dilaksanakan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)	2023	belum dilaksanakan
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)	2022	sedang dilaksanakan
6	Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN 6)	2024	belum dilaksanakan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	2022	sedang dilaksanakan

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 telah dilakukan audit tematik program pembangunan negara dalam RPJMN 2020-2024, yaitu Prioritas Nasional (PN) 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan yang selanjutnya disebut dengan tema pemeriksaan Penguatan Ketahanan Ekonomi; dan PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang selanjutnya disebut dengan tema pemeriksaan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Hasil pemeriksaan tematik BPK atas Prioritas Nasional (PN) 1 dan PN 3 disajikan per entitas yang diperiksa yaitu kementerian/lembaga/BUMN/badan lainnya serta pemerintah daerah dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pada Tahun 2021, pemeriksaan atas PN 1 dan PN 3 yang dilakukan oleh BPK menghasilkan 294 LHP yang terdiri dari 114 LHP PN 1 dan 180 LHP PN 3. Selanjutnya, seluruh hasil audit PN tersebut dituangkan dalam bab tersendiri di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021.

IHPS yang disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Di dalam pasal tersebut, mengatur bahwa IHPS disampaikan untuk lembaga perwakilan serta untuk

Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) adalah ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN) dan pada badan lainnya. IHPS memuat hasil dari tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT)/kepatuhan. IHPS disajikan per pengelola anggaran dan per jenis pemeriksaan, serta disajikan menurut tema dan fokus audit yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. Tema dan fokus audit tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan tematik atas pelaksanaan agenda pembangunan pemerintah yaitu pemeriksaan atas prioritas nasional (PN) yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyelarasan pelaksanaan pemeriksaan di BPK dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 telah dimulai di Tahun 2021 dengan memfokuskan pemeriksaan pada Prioritas Nasional (PN) 1 sampai dengan PN 7. Fokus pemeriksaan tematik Tahun 2021 yaitu PN 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi dan PN 3 Pembangunan Sumber Daya Manusia akan di jelaskan lebih terperinci pada paragraf-paragraf selanjutnya mengingat kedua PN tersebut telah dilaksanakan di Tahun 2021. Fokus pemeriksaan tematik BPK pada Tahun 2022 adalah PN 5 Penguatan Infrastruktur dan PN Penguatan Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik; Tahun 2023 BPK akan fokus pada pemeriksaan tematik atas PN 2 Pengembangan Wilayah dan PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; dan terakhir di Tahun 2024 BPK akan fokus pada pemeriksaan tematik agenda pembangunan PN 6 yaitu Pembangunan Lingkungan Hidup.

Prioritas Nasional (PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi dan PN 3 Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 tahun 2020 tentang Pemutakhiran

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, memiliki turunan berupa Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (ProP). Dari ProP tersebut, Pemerintah merancang Proyek Prioritas Strategis atau *Major Project* (MP). Rincian PP, KP, ProP, serta MP dalam PN 1 dapat dilihat dari Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Ringkasan Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) pada Prioritas Nasional (PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi

Prioritas Nasional 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi	8 Program Prioritas (PP)
	45 Kegiatan Prioritas (KP)
	112 Proyek Prioritas (ProP)
	8 Proyek Prioritas Strategis/<i>Major Project</i> (MP)

Sumber: Perpres Nomor 122 tahun 2020 (diolah)

Dari Gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa Prioritas Nasional (PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi ini memiliki delapan Program Prioritas (PP), 45 Kegiatan Prioritas (KP), dan 112 Proyek Prioritas (ProP). Dari 112 ProP tersebut, Pemerintah merancang Proyek Prioritas Strategis atau *Major Project* (MP) yang dikemas ke dalam delapan tema MP.

Gambaran lebih mendetail terkait dengan Prioritas Nasional (PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi beserta turunannya yaitu tujuh Program Prioritas (PP) dan 45 Kegiatan Prioritas (KP), serta realisasi pemeriksaan tematik di BPK pada Tahun 2021 adalah seperti yang terlihat dalam Gambar 1.2 sebagai berikut.

Gambar 1.2 Ringkasan Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) pada Prioritas Nasional (PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi serta Realisasi Pemeriksaan Strategis di BPK Tahun 2021

PP1. Energi dan Peningkatan EBT	KP1. Pembangkit Energi Terbarukan*
	KP2. Pasokan BBN
	KP3. Konservasi dan Efisiensi Energi
	KP4. Pemenuhan Energi Domestik
	KP5. Industri Pendukung EBT
PP2. Kuantitas/Ketahanan Air	KP1. Kawasan Berfungsi Lindung
	KP2. Hutan Berkelanjutan
	KP3. Air untuk Pertanian
	KP4. Air Baku Kawasan Prioritas
	KP5. Konservasi Sumber Daya Air
	KP6. Waduk Multiguna
PP3. Ketersediaan, akses, dan kuantitas konsumsi	KP1. Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, Biofortifikasi Pangan
	KP2. Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Laut*
	KP3. Produktivitas dan Kesejahteraan SDM Pertanian, Perikanan, dan Kepastian Pasar*
	KP4. Produktivitas Sumber Daya Pertanian dan Digitalisasi Pertanian
	KP5. Tata Kelola Sistem Pangan Nasional
PP4. Kemaritiman, perikanan, dan kelautan	KP1. Pengelolaan WPP, Penataan Ruang Laut, Zonasi Pesisir
	KP2. Ekosistem Kelautan dan Jasa Kelautan
	KP3. Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu, Nilai Tambah Produk KP
	KP4. Fasilitas, Pembiayaan, Perlindungan Usaha KP Skala Kecil
	KP5. SDM dan Riset Kemaritiman, Kelautan & Database KP
PP5. Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi	KP1. Kemitraan UMK dengan UMB
	KP2. Kapasitas usaha dan akses pembiayaan wirausaha
	KP3. Kapasitas, Jangkauan, dan inovasi koperasi
	KP4. Penciptaan start-up dan peluang usaha
	KP5. Nilai tambah usaha sosial
PP6. Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi Sektor Riil,	KP1. Industri pengolahan pertanian, kemaritiman, dan Non Agro (Hulu-Hilir)
	KP2. Industrialisasi Berbasis Hilirisasi SDA, Smelter & Kawasan Industri Luar Jawa*
	KP3. Daya Saing Destinasi & Industri Pengolahan Pariwisata*
	KP4. Nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif digital
	KP5. Iklim usaha, investasi & reformasi ketenagakerjaan*
	KP6. Industri halal
PP7. Ekspor dan Penguatan TKDN	KP1. Diversifikasi, Nilai Tambah, daya saing produk ekspor dan jasa
	KP2. Akses dan pendalaman pasar ekspor*
	KP3. Pengelolaan Impor*
	KP4. Kandungan dan Penggunaan Produk DN*
	KP5. Partisipasi Jaringan Produksi Global
	KP6. Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas, Branding & Produk
	KP7. Efektivitas PTA/FTA/CEPA dan Diplomasi Ekonomi
PP8. Pilar Pertumbuhan & Daya Saing Ekonomi	KP1. Pendalaman Sektor Keuangan
	KP2. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0
	KP3. Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	KP4. Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan & Pariwisata
	KP5. Reformasi Fiskal*
	KP6. Ketersediaan & Kualitas Data & Informasi Perkembangan Ekonomi

Sumber: Perpres Nomor 122 tahun 2020 Lampiran II dan Buku IHPS II Tahun 2021 (diolah)

*Merupakan realisasi pemeriksaan strategis PN 1 di BPK Tahun 2021

Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa dari delapan Program Prioritas (PP) yang menjadi turunan Prioritas Nasional (PN) 1, BPK hanya dapat melaksanakan pemeriksaan pada lima PP yaitu PP 1 yaitu Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT); PP 3 Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan; PP 6 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi; PP 7 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan PN 8 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. Kemudian dari lima PP tersebut, BPK hanya dapat melaksanakan pemeriksaan pada sepuluh Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi turunan PP, yaitu satu KP pada PP 1; dua KP pada PP 3; tiga KP pada PP 6; tiga KP pada PP 7; dan satu KP pada PP 8.

Adapun rincian PP, KP, ProP, serta MP pada PN 3 disajikan pada Gambar 1.3 berikut.

Gambar 1.3 Ringkasan Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP) pada Prioritas Nasional (PN) 3 Pembangunan Sumber Daya Manusia

Prioritas Nasional 3	7 Program Prioritas (PP)
Pembangunan	
Sumber Daya	29 Kegiatan Prioritas (KP)
Manusia	
	80 Proyek Prioritas (ProP)
	4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP)

Sumber: Perpres Nomor 122 tahun 2020 (diolah)

Gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa PN 3 Pembangunan Sumber Daya Manusia memiliki tujuh Program Prioritas (PP), 29 Kegiatan Prioritas (KP), dan 80 Proyek Prioritas (ProP) yang dirancang dalam empat MP. Gambaran lebih terperinci mengenai PP, KP, ProP adalah sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 1.4 berikut.

Gambar 1.4 Ringkasan Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) pada Prioritas Nasional (PN) 3 Pembangunan Sumber Daya Manusia serta Realisasi Pemeriksaan di BPK Tahun 2021

PP1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	KP1. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
	KP2. Integrasi Sistem Adminduk*
	KP3. Pendampingan dan Layanan Terpadu
	KP4. Pemanduan & Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
PP2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	KP1. SJSN
	KP2. Bansos dan Subsidi Tepat Sasaran*
	KP3. Perlindungan Sosial Adaptif*
	KP4. Kesejahteraan Sosial
PP3. Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan	KP1. Kesehatan Ibu, Anak, KB, & Kesehatan Reproduksi
	KP2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
	KP3. Pengendalian Penyakit*
	KP4. Penguatan Germas
	KP5. Penguatan Sistem Kesehatan dan POM*
PP4. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	KP1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
	KP2. Pemerataan Akses dan Wajar 12 Tahun
	KP3. Pengelolaan dan Penempatan Pendidik & Tenaga Kependidikan*
	KP4. Penjaminan Mutu Pendidikan
	KP5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan
PP5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	KP1. Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak
	KP2. Kesetaraan Gender, Pemberdayaan & Perlindungan Perempuan
	KP3. Kualitas Pemuda
PP6. Pengentasan Kemiskinan	KP1. Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga*
	KP2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial
	KP3. Reforma Agraria*
	KP4. Perhutanan Sosial
PP7. Produktivitas dan Daya Saing	KP1. Pendidikan & Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri*
	KP2. Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas
	KP3. Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi
	KP4. Prestasi Olahraga

Gambar 1.4 di atas terlihat bahwa dari tujuh Program Prioritas (PP) yang merupakan turunan dari Prioritas Nasional (PN) 3, BPK hanya memeriksa enam PP yaitu PP 1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan, PP 2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, PP 3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, PP 4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, PP 6 Pengentasan Kemiskinan, dan PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. Kemudian dari enam PP tersebut, BPK hanya memeriksa sembilan Kegiatan Prioritas (KP), yaitu satu KP pada PP 1; dua KP pada PP 2; dua KP pada PP 3; satu KP pada PP 4; dua KP pada PP 6; dan satu KP pada PP 7.

Pemeriksaan tematik atas agenda pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh BPK, dilakukan melalui dua jenis audit yaitu audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu (DTT)/kepatuhan. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja diperlukan metode untuk digunakan dalam memahami kebijakan pada kegiatan utama entitas, yang dapat memberikan dampak signifikan pada keakuratan analisis masalah dan keakuratan pemberian rekomendasi perbaikan kepada entitas (Sendjaja et al., 2015). Pemeriksaan kinerja umumnya mengikuti salah satu dari tiga pendekatan, yaitu: pendekatan berorientasi sistem, hasil, dan berorientasi masalah. Sebuah pendekatan dipilih berdasarkan kondisi dan tahap implementasi di masing-masing negara (Rajaguguk et al., 2017). Sedangkan tujuan pemeriksaan kepatuhan pada konteks audit atas program pembangunan pemerintah adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan suatu negara sesuai dengan tujuan, target, dan indikator di tingkat nasional (Rajaguguk et al., 2017).

Dalam pelaksanaannya di Tahun 2021, pemeriksaan pada Prioritas Nasional (PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi dan PN 3 Pembangunan Sumber Daya Manusia, dijumpai beberapa kelemahan. Di dalam Laporan Monitoring Pemeriksaan Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2021, disebutkan bahwa porsi pemeriksaan tematik khususnya untuk tematik nasional pada PN 1 dan PN 3 yang merupakan amanat Renstra BPK 2020-2024, hanya dapat dilakukan sebesar 25,31% dari total pemeriksaan yang dilaksanakan. Komposisi pemeriksaan tematik tersebut berdampak pada cakupan program prioritas (PP) dan kegiatan prioritas (KP) yang diperiksa di masing-masing PN, sehingga menimbulkan risiko tidak tercapainya pemberian rekomendasi dan bahan pendapat BPK yang lebih komprehensif atas permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan.

Di dalam jurnal yang ditulis Suartama et al. (2015) menyebutkan bahwa pemeriksaan BPK masih didominasi oleh pemeriksaan keuangan yang dilakukan secara terpisah, tidak sinergis satu sama lain, sehingga menjadi tantangan besar bagi BPK untuk dapat memberikan penilaian dan kesimpulan yang komprehensif

tentang hasil dan dampak yang diinginkan dari kebijakan pemerintah melalui program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Permasalahan lain yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan tematik agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sebagaimana yang disebutkan dalam Laporan Monitoring Pemeriksaan Strategis BPK Tahun 2021, adalah bahwa pemeriksaan yang dilakukan atas realisasi Prioritas Nasional (PN) pada Semester II tahun berjalan belum dapat menyimpulkan keseluruhan capaian *output* yang ditargetkan untuk tahun yang bersangkutan.

Lebih lanjut ditemukan permasalahan dalam penyajian Prioritas Nasional (PN) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) sebagai berikut.

- a. Keterkaitan tema PN dengan entitas yang diaudit (kementerian/lembaga/BUMN/badan lainnya serta pemerintah daerah) kurang informatif.

Dalam diskusi yang dilakukan antara BPK dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI pada tanggal 1 Juli 2022 yang membahas tentang pendalaman IHPS II Tahun 2021 atas LHP BUMN dan Badan Lainnya, salah satu tenaga ahli yang merupakan perwakilan dari BAKN yang mempertanyakan apakah ke depannya untuk memaksimalkan pemeriksaan BUMN akan ada tema prioritas, khusus untuk BUMN. Pertanyaan tersebut mengindikasikan adanya ketidakpahaman dari penanya mengenai fokus pemeriksaan tematik yang telah dilaksanakan BPK di Tahun 2021. Padahal seharusnya jika penanya membaca IHPS Semester II Tahun 2022, disana telah dijelaskan pada bab khusus yang menyajikan hasil pemeriksaan tematik BPK terkait dengan program-program pembangunan pemerintah pada PN 1 dan PN 3, termasuk di dalamnya hasil pemeriksaan tematik pada BUMN.

- b. Uraian penyajian hasil pemeriksaan rutin yang sesuai mandat dan pemeriksaan tematik terkait dengan penilaian terhadap agenda pembangunan belum terlihat jelas.

Hal ini diindikasikan dari adanya pertanyaan dari tenaga ahli BAKN yang lain yang mempertanyakan perbedaan antara tema pemeriksaan sesuai mandat dengan tema pemeriksaan tematik prioritas nasional. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembaca masih belum dapat menangkap maksud BPK dalam menyajikan hasil-hasil pemeriksaan dalam IHPS. Di dalam tulisannya, Goicoechea et al. (2021) menyampaikan bahwa sebuah laporan audit berisiko terlalu panjang dan rumit sehingga tidak dibaca oleh penerima laporan. Oleh sebab itu, sebaiknya auditor hanya memilih informasi yang paling menarik dan relevan untuk disajikan dalam laporannya. Proses audit juga merupakan proses yang kompleks sehingga pihak ketiga dapat mengalami kesulitan dalam memahami, terutama karena laporan hasil audit tidak terstandar baik dalam bentuk maupun isinya (Wooten & Colson, 2003).

Di dalam jurnalnya Cordo & Fülöp (2015) mengatakan bahwa banyak peneliti telah menganalisis tentang pengaruh dari laporan audit yang diperluas, yang dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna dalam menerima informasi lebih lanjut sesuai dengan tujuan audit. Penelitian terkait dengan penilaian pengguna terhadap laporan hasil audit telah menunjukkan peningkatan dalam hal komunikasi terhadap pengguna laporan, namun kesenjangan harapan tetap ada. Oleh sebab itu, penyempurnaan laporan hasil audit masih diperlukan (Church et al., 2008). Hal ini menjadi tantangan bagi peneliti dan regulator untuk menentukan bagaimana meningkatkan nilai laporan audit yang lebih komunikatif, tanpa menimbulkan kebingungan bagi pengguna.

Penyajian hasil audit/pemeriksaan dalam bentuk ikhtisar hasil pemeriksaan seperti yang dilakukan di BPK tidak banyak dijumpai pada *Supreme Audit Institutions* (SAIs) negara lain. Namun jurnal mengenai pentingnya perluasan laporan audit telah disampaikan oleh Cordo & Fülöp (2015). Goicoechea et al. (2021) juga menyampaikan bahwa memilih informasi yang paling menarik dan relevan untuk disajikan dalam laporan hasil audit adalah penting mengingat laporan yang terlalu panjang dan kompleks akan susah dipahami oleh pengguna laporan.

Wooten & Colson (2003) mengatakan bahwa pengguna laporan dapat mengalami kesulitan dalam memahami, terutama karena laporan hasil audit tidak terstandar baik dalam bentuk maupun isinya.

Di Indonesia belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas tentang penyajian ikhtisar hasil audit atas kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam rencana pembangunan nasional menjadi motivasi untuk melakukan penelitian ini. Sebagai pemeriksa eksternal pemerintah, BPK telah memiliki standar dalam menyajikan LHP yaitu terdapat dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menjadi pedoman auditor di BPK dalam melaksanakan pemeriksaan. Namun, BPK belum memiliki standar penyajian IHPS, termasuk dalam menyajikan ikhtisar hasil pemeriksaan atas pelaksanaan rencana pembangunan pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada kontribusi BPK dalam menilai kebijakan pembangunan pemerintah dan berpengaruh pada perbaikan/penyempurnaan yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan atas implementasi kebijakan pembangunan yang tidak/belum sesuai dengan perencanaan.

Dari fakta di lapangan dan evaluasi pada pelaksanaan pemeriksaan/audit di Tahun 2021 yaitu agenda pembangunan Prioritas Nasional (PN) 1 dan PN 3 yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan PN 1 dan PN 3 tersebut secara menyeluruh pada program/kegiatan. Hal ini terjadi karena adanya kurangnya *resources* di BPK baik sumber daya manusia maupun anggaran. Meskipun BPK memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, namun BPK harus mampu untuk tetap menyajikan ikhtisar hasil pemeriksaan yang menyatukan seluruh hasil-hasil pemeriksaan dalam satu PN dan diturunkan ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), maupun *Major Project* (MP).

Berdasarkan data dari Biro SDM di BPK, per Mei 2023 BPK memiliki pemeriksa/auditor sebanyak 5.671 pemeriksa yang sebagian besar adalah pemeriksa pertama sebanyak 3.378 pemeriksa termasuk pegawai baru yang baru terangkat

sebagai pemeriksa pertama di bulan Maret 2023 sebanyak 1.200 pemeriksa. Untuk dapat melakukan pemeriksaan tematik, BPK membutuhkan pemeriksa yang sudah pernah melaksanakan pemeriksaan kinerja dan atau pemeriksaan tematik. Jumlah entitas pemeriksaan di BPK sekitar 1.097 entitas. Pada waktu yang sama selain melakukan pemeriksaan tematik, BPK juga harus melaksanakan pemeriksaan mandatori dan pemeriksaan signifikan lainnya. Rata-rata tim kecil untuk setiap pemeriksaan membutuhkan sekitar 6 orang pemeriksa, sementara tim yang dibutuhkan dalam setiap pemeriksaan tematik nasional bisa mencakup seluruh provinsi di Indonesia dan sampling pada beberapa kabupaten/kota di setiap provinsi. Selain itu untuk pemerintah pusat, dapat melibatkan beberapa kementerian/lembaga yang terkait.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pakar Kebijakan Publik sekaligus Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), RN. Menurutnya, posisi BPK sebagai lembaga yang setara dengan Presiden, adalah tepat untuk melakukan audit yang bersifat makro yang menilai agenda pembangunan pemerintah.

“Jadi, apabila melakukan audit, baik post atau pre tentang rencana pembangunan jangka panjang dan pencapaiannya itu justru bagus. Kenapa? Yang dilakukan adalah bukan audit mikro tapi makro dalam sebuah agregasi. Jadi, pemerintah mempunyai rencana kerja yang dalam bentuk agregat tadi ya. Tapi disajikannya dalam kesatuan. Nah, kenapa baik? Karena tidak ada lagi lembaga yang bisa menilai ini secara independen tetapi di dalam kerangka tatanan kelola negara, kecuali BPK. Presiden? Presiden nggak mampu, kerjanya itu terlalu detail. KSP? Orangnya kurang banyak. Setneg? Bukan bidangnya. Jadi, satu-satunya mitra kerja yang paling kompeten bagi Presiden ee kredibel juga dan berintegritas adalah BPK. Justru BPK ketika diberikan tugas untuk mengevaluasi dan mengaudit, katakanlah mulai.. katakanlah dimulai dari kerjanya, bagus dan itu harus”.

Ketua Kompartemen Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia, HS juga menyampaikan hal yang senada. Ia mengatakan bahwa tugas BPK di antaranya

adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola dalam kehidupan bernegara ini harus dilaksanakan secara tertib.

[.....] sektor utama di sektor publik ya pemerintahan, ya. Nah, kalau kita bicara tentang keuangan negara ataupun sektor publik. Ee.. sub-sektor pemerintahan, ya kan? Maka tidak lepas dari prinsip tata kelola penganggaran. Nah, penganggaran itu harus dikelola secara tertib, taat peraturan, ekonomis, efektif, akuntabel dan transparan. Kemudian ee memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, ini siapa yang memastikan itu? Nah, maka dibentuklah ee suatu lembaga yang memeriksa penganggaran untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola penganggaran itu bisa ee terwujud, gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ya itu tadi, karena undang-undang ini adalah jabaran dari undang-undang dasar maka kita merujuk ke tujuan negara, bahwa prinsip tata kelola penganggaran itu adalah dalam rangka mencapai tujuan kenegaraan, gitu. Itu gambaran besarnya. Sehingga siapa lembaga yang perlu tanggung jawab untuk memastikan prinsip tata kelola itu diterapkan atau berhasil? Ya, BPK”.

Lebih lanjut HS mengatakan bahwa BPK adalah alat negara untuk mencapai tujuan ke negara. Fungsi BPK di antaranya adalah untuk membantu negara untuk mencapai tujuannya melalui fungsi pengawasan dan fungsi auditnya yang dikenal ada tiga jenis audit, yaitu audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan fakta observasi di lapangan dan pandangan para ahli mengenai fungsi BPK dalam fungsinya untuk melakukan pemeriksaan terhadap agenda pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah seperti uraian di atas, penelitian ini akan membangun sebuah model kebijakan pemeriksaan tematik terkait dengan penilaian atas rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dituangkan dalam tujuh prioritas nasional.

Dalam penelitian ini digunakan terminologi bahwa kata pemeriksaan dan audit adalah sebuah sinonim.

B. Identifikasi Masalah

Hasil identifikasi menunjukkan adanya permasalahan dalam pemeriksaan tematik BPK terhadap agenda pembangunan sebagai berikut.

- 1) BPK masih memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran untuk dapat melaksanakan pemeriksaan tematik agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- 2) Kurang luasnya cakupan pemeriksaan tematik tentang agenda pembangunan yang dilaksanakan di BPK menimbulkan risiko tidak tercapainya penilaian dari BPK yang lebih komprehensif atas permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan.
- 3) Terdapat ekspektasi dari publik terkait dengan sampel pemeriksaan yang dapat mewakili populasi dari program/kegiatan yang diperiksa.
- 4) Pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas pelaksanaan agenda pembangunan melalui program/kegiatan prioritas nasional pada Semester II tahun berjalan belum dapat menyimpulkan keseluruhan capaian *output* yang ditargetkan untuk tahun yang bersangkutan.
- 5) BPK masih memiliki tantangan besar untuk dapat memberikan penilaian dan kesimpulan yang komprehensif tentang hasil dan dampak yang diinginkan dari kebijakan pemerintah melalui program pembangunan (Suartama et al., 2015).
- 6) Masih terdapat ketidakpahaman dari pembaca/pengguna laporan mengenai fokus pemeriksaan tematik yang telah dilaksanakan BPK di Tahun 2021 dan dituangkan dalam buku IHPS II Tahun 2021 (Hasil Diskusi antara BPK dengan BAKN DPR RI tanggal 1 Juli 2022).
- 7) BPK sebagai *Supreme Audit Institutions* belum memiliki model penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan, terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan nasional.

C. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana model kebijakan pemeriksaan tematik atas agenda pembangunan oleh pemerintah pada Badan Pemeriksa Keuangan yang dapat memberikan penilaian yang memadai terhadap suatu program prioritas nasional di dalam ikhtisar hasil pemeriksaan?

D. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menawarkan alternatif solusi berupa model kebijakan pemeriksaan tematik atas agenda pembangunan pemerintah di BPK, yang outputnya disajikan di dalam ikhtisar hasil pemeriksaan baik semester maupun pada akhir periode renstra (lima tahun).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1) Bagi praktisi, penelitian ini dapat memberikan ide/gagasan baru baru termasuk pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia maupun di negara lain terkait dengan model kebijakan pemeriksaan tematik yang menilai kebijakan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan nasional;
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai pembelajaran dalam hal membuat model kebijakan pemeriksaan tematik agenda pembangunan nasional yang dapat menghasilkan output yang bermanfaat dan digunakan oleh klien BPK.